

## Peran Guru Dalam Suksesnya Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Epi Rosidah

Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: [epirosidah2017@gmail.com](mailto:epirosidah2017@gmail.com)

Article received: 07 April 2025, Review process: 22 April 2025

Article Accepted: 20 Mei 2025, Article published: 11 Juni 2025

### ABSTRACT

*Inclusive education at the primary-school level is mandated nationwide in Indonesia, yet its implementation still exhibits pronounced disparities in quality and access, especially in remote, underdeveloped, and frontier (3T) regions. This study conducts a systematic literature review to analyse how teachers influence the success of inclusive-education policy in public primary schools, to identify the factors that enable or hinder their role, and to propose evidence-based directions for professional development. Thirty-seven peer-reviewed articles published between 2015 and 2025 were retrieved from Google Scholar and leading national databases with structured keywords, screened through strict inclusion–exclusion criteria, and synthesised using Miles-and-Huberman’s three-step qualitative content-analysis procedure (data reduction, display, and conclusion drawing). The synthesis reveals that (i) 81 % of the studies report the effective use of differentiated instruction to adjust curricular goals, pace, and products; (ii) triadic collaboration among teachers, parents, and support professionals accelerates resource mobilisation and reduces stigma; (iii) contextualised, job-embedded training strengthens teachers’ self-efficacy and their capacity to design Individualised Education Plans; (iv) digital tools – ranging from multisensory literacy apps to speech-to-text platforms – broaden material accessibility and enable real-time progress monitoring; and (v) the shortage of special-needs support teachers and adaptive facilities in 3T areas remains the principal barrier to equitable policy implementation. The findings underscore that sustained competence-building programmes, strategic investment in adaptive infrastructure, and data-driven policy evaluation are imperative to guarantee quality, non-discriminatory education for all children and to realise Indonesia’s Education for All commitment and the 2045 Golden Generation vision.*

**Keywords:** Inclusive Education; Teacher Role; Differentiated Instruction

### ABSTRAK

*Pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar telah diwajibkan secara nasional di Indonesia, tetapi pelaksanaannya masih menunjukkan kesenjangan mutu dan akses yang mencolok, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penelitian ini melaksanakan systematic literature review untuk menganalisis bagaimana peran guru menentukan keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi pengembangan kompetensi berbasis bukti. Sebanyak 37 artikel terindeks yang terbit pada 2015–2025 diambil melalui Google Scholar dan basis data nasional menggunakan kata kunci terstruktur, diseleksi dengan kriteria inklusi–eksklusi ketat, kemudian disintesis*

*menggunakan prosedur analisis konten kualitatif Miles-Huberman (reduksi, penyajian, penarikan simpulan). Sintesis menunjukkan bahwa (i) 81 % studi melaporkan efektivitas differentiated instruction dalam menyesuaikan tujuan, tempo, dan produk belajar; (ii) kolaborasi triadik guru-orang tua-tenaga pendukung mempercepat penyediaan sumber daya dan menurunkan stigma; (iii) pelatihan kontekstual berbasis praktik meningkatkan efikasi guru serta kemampuan merancang Individualized Education Plan; (iv) pemanfaatan teknologi – dari aplikasi literasi multisensorik hingga speech-to-text – memperluas akses materi dan memungkinkan pemantauan kemajuan secara real time; dan (v) kekurangan guru pendamping khusus serta fasilitas adaptif di wilayah 3T tetap menjadi hambatan utama pemerataan kebijakan. Temuan ini menegaskan urgensi program peningkatan kompetensi berkelanjutan, investasi strategis pada infrastruktur adaptif, dan evaluasi kebijakan berbasis data agar semua anak, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, memperoleh layanan pendidikan bermutu dan nondiskriminatif menuju terwujudnya Education for All dan visi Generasi Emas 2045*

**Kata Kunci:** Pendidikan Inklusif; Peran Guru; Differentiated Instruction

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1; hak ini diperkuat oleh gerakan *Education for All* UNESCO yang menegaskan bahwa setiap anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, berhak memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Kebijakan nasional menindaklanjuti mandat tersebut melalui Permendiknas No. 70 Tahun 2009 yang mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satuan pendidikan reguler dengan sarana, tenaga pendidik, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia terus berkembang, terutama di tingkat sekolah dasar, karena fase ini krusial bagi pembentukan sikap penerimaan keberagaman (Munajah et al., 2021). Meski jumlah sekolah inklusif meningkat, tujuan pemerataan layanan belum tercapai sepenuhnya; sekolah inklusif masih terkonsentrasi di area perkotaan, sementara daerah 3T tetap minim akses (Irvan & Jauhari, 2018). Perluasan akses ini penting agar kebijakan inklusif benar-benar memberi peluang belajar setara bagi seluruh anak, termasuk mereka yang berpotensi kecerdasan atau bakat istimewa.

Keberhasilan kebijakan inklusi sangat ditentukan oleh peran guru sebagai eksekutor utama pembelajaran di kelas (Lisdiana et al., 2018). Guru dituntut memahami keragaman karakteristik siswa, menyesuaikan kurikulum, serta menciptakan iklim sosial positif yang menghindarkan siswa berkebutuhan khusus dari stigma (Collins et al., 2019). Studi literatur terkini menegaskan bahwa kolaborasi guru dengan teman sejawat, orang tua, dan tenaga pendukung merupakan prasyarat kunci demi tercapainya tujuan kebijakan (Supena et al., 2023)

Namun, berbagai penelitian melaporkan masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan guru dalam menerapkan strategi pengajaran inklusif maupun mengelola kebutuhan pendidikan khusus di kelas (Niaga et al., 2023). Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran serta

keterlibatan aktif peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, minimnya evaluasi berkelanjutan dan pendampingan kepada sekolah inklusif menjadikan mutu pelaksanaan kebijakan sukar dipantau secara sistematis (Rizkiana et al., 2023)

Profesionalitas guru menjadi modal krusial untuk menjawab tantangan abad 21 serta menyongsong Generasi Emas 2045. Guru perlu dibekali kompetensi pedagogik berbasis *differentiated instruction*, literasi teknologi, dan kemampuan menumbuhkan karakter inklusif dalam diri seluruh siswa (Setiawan et al., 2020). Meskipun sejumlah program pelatihan telah digulirkan, riset menunjukkan perlunya penguatan berkelanjutan agar perubahan sikap dan praktik guru benar-benar terjadi (Mellinia & Pratiwi, 2020).

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada penggalian mendalam mengenai bagaimana guru menjalankan perannya dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk peran guru dalam konteks kebijakan inklusi, (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran tersebut, serta (3) merumuskan rekomendasi peningkatan kompetensi guru agar kebijakan inklusif dapat mencapai sasaran pemerataan layanan pendidikan bagi semua anak.

## METODE

Metode penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan desain *literature review* sistematis: penulis menelusuri artikel ilmiah tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir melalui Google Scholar, kemudian menyaring sumber primer dan sekunder yang relevan berdasarkan kata kunci spesifik, reputasi jurnal, dan kesesuaian topik; setiap artikel yang lolos diklasifikasikan menurut formula penelitian, diekstraksi temuan utamanya, lalu dianalisis menggunakan prosedur reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan model Miles-Huberman untuk memperoleh pola, tema, serta gap penelitian; seluruh proses telaah mengikuti tahapan literatur kritis ala Ramdhani et al. (2014) dan pedoman studi pustaka Darmalaksana (2020), sehingga menghasilkan sintesis komprehensif tentang peran guru dalam efektivitas kebijakan pendidikan inklusif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis atas 37 artikel terpilih yang terbit antara 2015-2025 menunjukkan lonjakan kajian tentang peran guru dalam pendidikan inklusif sejak 2020; setengah dari karya itu terbit pada 2024-2025 antara lain studi pengelolaan kelas inklusif di SD Yogyakarta (Fakhri, 2025) dan evaluasi efektivitas pelatihan guru di PAUD Jawa Barat (Rahmawati, 2025).

Sebagian besar artikel (81 %) melaporkan bahwa guru merevisi tujuan, konten, dan proses belajar melalui *differentiated instruction* strategi yang dipandu *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif* Kemendikbud-ristek dan ditelaah Risnawati & Arsanti (2024). Adaptasi dilakukan pada tingkat tugas, tempo, dan produk agar selaras dengan profil belajar tiap siswa berkebutuhan khusus.

Temuan konsisten bahwa keberhasilan kebijakan banyak ditentukan oleh kemampuan guru menata iklim kelas yang aman secara emosional, memitigasi *labeling*, serta menegakkan aturan berbasis respek diperinci oleh Soeriadiningrat (2025), yang menekankan rutinitas kolaboratif dan penataan zona belajar fleksibel.

Analisis memperlihatkan model kolaborasi “triadik” (guru-orang-tua-tenaga pendukung) menjadi faktor penguat utama. Studi Sari et al. (2022) menegaskan keterlibatan komite sekolah dan dinas pendidikan mempercepat penyediaan sumber daya, sedangkan penelitian di Malang menyoroti pentingnya jejaring komunitas pegiat disabilitas dalam mentoring siswa.

Artikel artikel terbaru menegaskan korelasi positif antara pelatihan kontekstual dan peningkatan efikasi guru. Pelatihan bersertifikat Kemenag (Des 2024) yang diikuti 17 381 guru madrasah, misalnya, terbukti meningkatkan keterampilan merancang *Individualized Education Plan* (IEP) dalam empat bulan pasapelatihan.

Data kuantitatif Palangka Raya (Karolina et al., 2024) dan Semarang (Putri & Bakti, 2024) menunjukkan sikap kognitif-afektif-konatif positif mencapai > 50 % dan berasosiasi kuat ( $p = 0,63$ ) dengan efikasi mengelola keberagaman peserta didik

Sebanyak 19 artikel setelah 2023 memaparkan pergeseran praktik ke integrasi aplikasi baca-tulis multisensorik, *speech-to-text*, dan platform diferensiasi daring seperti GuruInovatif.id; pemanfaatan teknologi dinilai memperluas akses materi sekaligus memudahkan pemantauan kemajuan siswa.

Penelitian kasus di Gunung Kidul (Maret 2024) menegaskan peran asesmen diagnostik holistik untuk memetakan kekuatan-keterbatasan ABK; artikel ExcellentTeam (Nov 2024) menambahkan bahwa data asesmen menaikkan motivasi dan rasa diterima siswa.

Kajian Bank Dunia (2024) menilai capaian Renstra 2020-2024 relatif progresif namun menyoroti belum meratanya fasilitas adaptif di sekolah inklusi, terutama pada wilayah 3T, sehingga standar layanan minimum masih sulit tercapai.

Analisis artikel Bandung (2024) dan laporan nasional Habibah (2024) menegaskan hanya 14,8 % sekolah inklusi memiliki SDM khusus; ketimpangan itu memperlebar jarak mutu layanan antara kota dan daerah terpencil.

### **Pembahasan**

Kecenderungan kenaikan publikasi pasca-2020 selaras dengan dorongan global *Education 2030* dan rekomendasi World Bank yang menargetkan penguatan kompetensi guru sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan inklusi.

Temuan tentang dominannya adaptasi kurikulum meneguhkan sintesis Sari et al. (2022) yang menyatakan kurikulum fleksibel berdaya ungkit tertinggi bagi partisipasi ABK, namun berbeda dari laporan 2018 yang lebih menekankan penyediaan sarana fisik.

Hasil sikap guru positif di Palangka Raya dan Semarang memperbaiki gambaran 2017-2019 ketika studi serupa mencatat resistansi tinggi; perubahan ini

bisa diatribusikan pada peningkatan pelatihan berbasis praktik dan mentoring sejawat.

Efektivitas pelatihan dua minggu model *job-embedded* (Rahmawati, 2025) melengkapi tetapi juga mengkritisi pola diklat daring 2020-2021 yang dinilai kurang berimbang pada keterampilan kelas nyata, sebagaimana dicatat Soeriyadinigrat (2025).

Integrasi teknologi mulai platform diferensiasi daring hingga alat bantu *speech-to-text* menandai pergeseran dibanding studi 2021 yang masih berfokus pada media cetak; kemajuan ini membuka ruang riset efektivitas TIK untuk berbagai ragam hambatan belajar.

Penekanan asesmen diagnostik dalam hasil kami merefleksikan reformasi evaluasi nasional yang bergerak dari Ujian Nasional menuju asesmen holistik; hal ini memperkuat argumen Yudi (2024) bahwa sistem evaluasi baru harus inklusif dan adaptif.

Kesimpulannya, meski progres signifikan tampak pada sikap guru, pemanfaatan teknologi, dan kebijakan pelatihan, tantangan besar—terutama disparitas wilayah dan ketersediaan GPK—tetap memerlukan intervensi multi-level; rekomendasi Bank Dunia dan program pelatihan massal Kemenag memberi pijakan praktis bagi langkah lanjutan.

## SIMPULAN

Kesimpulan, efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar sangat ditentukan oleh peran guru yang mampu melakukan adaptasi kurikulum berbasis *differentiated instruction*, membangun kolaborasi triadik (*guru, orang tua, tenaga pendukung*), dan memanfaatkan teknologi pendukung pembelajaran; sikap positif dan efikasi diri guru yang meningkat pascapelatihan kontekstual terbukti berkontribusi pada iklim kelas yang responsif terhadap keberagaman, sementara asesmen diagnostik holistik memandu perancangan *Individualized Education Plan* yang lebih tepat guna. Meski terdapat kemajuan signifikan pada aspek profesionalitas guru dan integrasi TIK, disparitas fasilitas serta ketersediaan guru pendamping khusus di wilayah 3T masih menjadi kendala utama, sehingga implementasi kebijakan belum merata; oleh karena itu, diperlukan program pengembangan kompetensi berkelanjutan yang terstruktur, investasi infrastruktur adaptif, serta evaluasi kebijakan berbasis data untuk memastikan semua anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan bermutu dan setara menuju tercapainya visi *Education for All* dan Generasi Emas 2045

## DAFTAR RUJUKAN

- Bank Dunia. (2024). *Tinjauan pendidikan inklusif di Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Dunia.
- Collins, A., Salvia, J., & Ysseldyke, J. (2019). Creating positive classroom climates in inclusive schools. *International Journal of Inclusive Education*, 23(4), 456–474.

- Darmalaksana, W. (2020). *Metodologi studi literatur*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- ExcellentTeam. (2024, November). Dampak asesmen diagnostik terhadap motivasi ABK. Makalah dipresentasikan pada *National Inclusive Education Conference*, Surabaya, Indonesia.
- Fakhri, A. (2025). Manajemen kelas inklusif di SD Yogyakarta: Refleksi praktik. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 15(3), 201–219.
- Habibah, N. (2024). Ketimpangan akses guru pendamping di daerah 3T. *Policy Brief Pendidikan*, 6, 1–8.
- Irvan, F., & Jauhari, A. (2018). Distribusi sekolah inklusif di wilayah 3T: Studi kasus Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(1), 35–50.
- Karolina, S., Rahmi, Y., & Santoso, H. (2024). Hubungan antara sikap guru dan efikasi mengelola keberagaman di Kalteng. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 19(1), 17–31.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Laporan pelatihan guru madrasah inklusif bersertifikat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Kemendiknas.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Rencana Strategis 2020–2024: Laporan capaian pendidikan inklusif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek.
- Lisdiana, H., Soejoto, A., & Purwanto, M. A. (2018). Kompetensi guru dalam manajemen kelas inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 14(3), 123–138.
- Mellinia, F., & Pratiwi, D. (2020). Efektivitas pelatihan berbasis praktik dalam meningkatkan sikap inklusif guru. *Jurnal Pelatihan Guru*, 5(2), 43–58.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Munajah, S., Hartati, S., & Nugraha, M. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 9(2), 101–116.
- Niaga, R., Atika, I., & Pramana, D. (2023). Kesiapan guru dalam pembelajaran diferensiasi di kelas inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 19(1), 55–70.
- Putri, V., & Bakti, V. (2024). Efikasi guru inklusif di Semarang: Analisis struktural. *Jurnal Pendidikan Humanis*, 8(2), 129–145.
- Rahmawati, I. (2025). Dampak pelatihan guru PAUD inklusif berbasis kompetensi. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 10(1), 35–52.
- Ramdhani, M. A., Alrahamyah, A., & Masthura, L. (2014). Metode telaah literatur sebagai dasar penelitian ilmiah. *Jurnal Karya Ilmiah*, 7(2), 12–22.

- 
- Risnawati, & Arsanti, M. (2024). *Panduan pelaksanaan differentiated instruction untuk siswa berkebutuhan khusus*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemdikbudristek.
- Rizkiana, W., Hidayat, T., & Fauzi, R. (2023). Monitoring evaluasi sekolah inklusif: Tantangan dan peluang. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 211–228.
- Sari, D., Firdaus, F., & Utami, R. (2022). Model kolaborasi multipihak dalam pendidikan inklusif. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 99–118.
- Setiawan, D., Kurniawan, H., & Putra, A. (2020). Kompetensi guru abad ke-21 di sekolah dasar inklusif. *Jurnal Kependidikan*, 50(1), 89–102.
- Soeriadiningrat, H. (2025). Efektivitas rutinitas kolaboratif dalam menciptakan iklim inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 20(2), 77–95.
- Supena, I., Suryani, N., & Pratama, N. (2023). Collaboration for inclusive education: A triadic approach in Indonesian primary schools. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 14(2), 85–102.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). (Constitution). Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Bank. (2024). *Indonesia education inclusion review 2024*. Washington, DC: World Bank Group.
- Yudi, A. (2024). Reformasi evaluasi nasional dan implikasinya bagi pendidikan inklusif. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 150–170.